



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERIODE 2015-2022**

Skripsi

Diajukan oleh:

Dhea Novitasari Bekhci

0221 19 157

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2023



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERIODE 2015-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERIODE 2015-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Rabu, 18 Oktober 2023

Dhea Novitasari Bekhci
022119157

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak, CSA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., MM)



Anggota Komisi Pembimbing
(Mutiara Puspa Widyowati, SE, Ak., MAcc)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhea Novitasari Bekhci
NPM : 022119157
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Periode 2015-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, September 2023



Dhea Novitasari Bekhci
0221 19 157

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

DHEA NOVITASARI BEKHCI, 022119157, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Periode 2015-2022, di bawah bimbingan Ketua Komisi Bapak BUNTORO HERI PRASETYA, dan Anggota Komisi Ibu MUTIARA PUSPA WIDYOWATI, 2023.

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2015-2022.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan sampel yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2015-2022 menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolonieritas, lalu dilakukan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung periode 2015-2022.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Periode 2015-2022”** yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Universitas Pakuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Skripsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tuaku Bapak Sarya Saryana & Ibu Eri Purwati yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kedua kakak kandungku Nur Vona Eriyana & Nur Fadli Saputra yang selalu menguatkan serta memberikan dukungan, doa, semangat, dan selalu membantu dari segi materi sehingga penulis dapat melanjutkan perkuliahan sampai selesai.
4. Bapak Dr. Buntoro Heri Prasetya, Ak., MM selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen-dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Agistna Aulia Rachmawati, Dila Nurmeilani, Gina Hadina Fitri, Okky Jayanti, dan Siti Rahayu yang selalu memberikan banyak perhatian, semangat, dan telah menemani penulis dari semester 1 hingga sekarang.
8. Teman-teman kelas E Akuntansi 2019 yang telah memeberikan warna selama perkuliahan, semangat, keceriaan. Tak lupa juga kepada teman-teman konsentrasi Akuntansi Sektor Publik 2019 yang telah berbagi ilmu selama perkuliahan.
9. Dhea Novitasari Bekhci, *last but no least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah walaupun banyak

sekali cobaan yang datang. Terima kasih sudah kuat, dan terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Kamu hebat, kamu keren!.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, September 2023

Penulis

Dhea Novitasari Bekhci
022119157

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Praktis	7
1.4.2. Kegunaan Akademis	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	8
2.2. Pendapatan Asli Daerah	8
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	8
2.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	9
2.3. Dana Perimbangan	11
2.3.1. Pengertian Dana Perimbangan	11
2.3.2. Klasifikasi Dana Perimbangan	12
2.4. Belanja Modal	13
2.5. Keuangan Daerah	14
2.6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.6.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.6.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	16
2.6.3. Indikator Kinerja Keuangan Daerah	17
2.7. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	19
2.7.1. Penelitian Sebelumnya	19
2.7.2. Kerangka Pemikiran	26
2.8. Hipotesis Penelitian	28
BAB III. METODE PENELITIAN	30

3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	30
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	30
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	32
3.6. Metode Pengumpulan Data	32
3.7. Metoda Pengolahan/Analisis Data	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data	37
4.2 Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti	41
4.3 Analisis Data	44
4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian	53
BAB V. SIMPULAN & SARAN	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Realisasi APBD Kabupaten Bandung.....	4
Tabel 1.2 : Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.....	4
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 : Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1 : Realisasi PAD Kabupaten Bandung	41
Tabel 4.2 : Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bandung	42
Tabel 4.3 : Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bandung.....	43
Tabel 4.4 : Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	43
Tabel 4.5 : Analisis Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.6 : Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.7 : Hasil Uji Multikolonieritas	47
Tabel 4.8 : Hasil Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.9 : Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda	50
Tabel 4.10 : Hasil Uji Parsial (Uji t)	51
Tabel 4.11 : Hasil Uji Simultan (Uji F).....	52
Tabel 4.12 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran	28
Gambar 2.2 : Hipotesis Penelitian.....	29
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kabupaten Bandung	38
Gambar 4.2 : Rasio Kabupaten Bandung	44
Gambar 4.3 : Pola Titik-titik Scatterplot.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Tabel Uji t.....	65
Lampiran 2 : Tabel Uji F.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diyakini merupakan cara terbaik untuk mendorong pembangunan daerah dalam menggantikan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan masing-masing daerah.

Otonomi daerah bertujuan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam melaksanakan pembangunan dan pembiayaan daerah, pemerintah daerah haruslah memiliki dana yang bersumber dari pendapatan-pendapatan yang diterima daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, menyatakan pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Selain PAD dan Dana Perimbangan, Belanja Modal juga sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah (Fisa, 2016).

Demi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dituntut untuk dapat meningkatkan PAD. Selain PAD, sumber pendapatan daerah lainnya yang berupa Dana Perimbangan juga harus dikelola dengan tepat. Pendapatan yang diperoleh tersebut secara maksimal diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan daerah berupa infrastruktur atau sarana prasarana dan kebutuhan daerah lain melalui alokasi belanja modal pada APBD. Alokasi belanja modal diadakan demi pemenuhan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk meningkatkan fasilitas publik serta kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah daerah mengubah komposisi belanjanya agar pemanfaatannya dapat lebih banyak diserap untuk hal-hal produktif, seperti melakukan pembangunan infrastruktur dan menambah program-program layanan publik (Yanti, 2019). Pengelolaan pendapatan serta pengalokasian belanja dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri (Swastika, 2015). Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa

rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012).

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Menurut Anike (2022), dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah ada beberapa rasio yang bisa digunakan, diantaranya adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010:138).

Salah satu masalah yang di hadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung ini adalah kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensi pendapatan asli daerah. Sehingga meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kinerja keuangan daerah menurun (Kadek dan Putu, 2019). Tingginya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat berarti pemerintah daerah belum secara optimal menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih (Indriani dan Sastradipraja, 2014). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kamaroellah, 2017). Pendapatan yang di terima dalam APBD akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya, dan diharapkan pendapatan tersebut akan terus meningkat secara signifikan tiap tahunnya (Kadek dan Putu, 2019). Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi APBD Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

Tabel 1.1 Realisasi APBD Kabupaten Bandung (2015-2022) (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Keterangan		
	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
2015	621.098	2.286.770	531.128
2016	856.514	2.992.226	569.468
2017	936.906	3.009.662	628.498
2018	927.543	3.137.666	713.093
2019	1.025.354	3.374.889	1.088.250
2020	1.109.354	2.957.339	733.919
2021	1.095.970	3.292.864	706.782
2022	1.248.859	3.923.619	926.207

Sumber: www.bandungkab.go.id (Data telah diolah 2023)

Tabel 1.1 membuktikan bahwa Dana Perimbangan dijadikan dana utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Gambaran dari kemampuan keuangan pemerintah daerah yang semakin kuat, ditentukan dari seberapa besar penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Tujuannya untuk meminimalkan ketergantungan pada dana perimbangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan (Antari dan Sedana, 2018). Berikut ini adalah data Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

Tabel 1.2 Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (2015-2022) (dalam ribu rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Pertumbuhan (%)
2015	3.961.557.568	0,65
2016	4.607.669.373	16,31
2017	5.081.260.298	10,28
2018	5.259.974.811	3,52
2019	5.730.185.099	8,94
2020	5.345.992.773	-6,70
2021	5.752.869.025	7,61
2022	5.925.628.981	3,00

Sumber: www.bandungkab.go.id (Data telah diolah 2023)

Tabel 1.2 menunjukkan data mengenai Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022. Total Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dilihat dari segi pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2015-2022 adalah 5,45%. Seperti yang dilansir oleh (antaranews.com) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung tahun 2022 naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meski tidak memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang diterima, target PAD Kabupaten Bandung tahun 2022 adalah sebesar Rp1,248 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,237 triliun. Selain itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa “Peningkatan PAD ini di dapat dari sektor pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain sumber PAD yang sah, yang memang ditargetkan untuk meningkat”.

Dalam kurun waktu 2015-2022, Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.248.858.860.203, sedangkan Dana Perimbangan tertinggi juga terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.923.619.386.568. Hal ini menjadi bukti bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi Pendapatan Daerah yang membuat meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan (Antari dan Sedana, 2018). Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah tersebut mampu untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatannya secara signifikan setiap tahunnya (Kadek dan Putu, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Magfira (2022), yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Magfira (2022) adalah:

1. Lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Magfira (2022) berlokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Periode penelitian, pada penelitian ini periodenya selama 8 tahun mulai dari 2015-2022, sedangkan pada penelitian Magfira (2022) periodenya selama 10 tahun mulai dari 2011-2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka kali ini akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal**

terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Periode 2015-2022”.

1.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensi pendapatan asli daerah sehingga meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan. Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin meningkat sehingga kinerja keuangan daerah akan semakin menurun.

1.1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022?

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat meningkatkan rasio PAD dan Belanja Modal agar tingkat kemandiriannya semakin meningkat dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022.
2. Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022.

3. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022.
4. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode anggaran 2015-2022.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih luas dalam mengembangkan ilmu mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya Akuntansi Pemerintahan tentang kemandirian keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim dan Kusufi (2019), Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Jamaluddin Majid (2019), Akuntansi sektor publik merupakan teknik mekanisme dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi sektor publik merupakan teknik mekanisme pada organisasi publik yang terdiri atas proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menjadi sebuah informasi keuangan bagi pihak-pihak terkait untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:14) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi atau alokasi sumber daya yang diperlukan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara efektif program dan pengguna sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli

Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Vidia (2022), Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang diterima pemerintah daerah melalui sumber-sumber potensi daerah asli yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah seperti pengeluaran operasional dan pengeluaran untuk pembangunan daerah.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Alat Berat (PAB)
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
5. Pajak Air Permukaan (PAP)
6. Pajak Rokok
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBB)

Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBB)
7. Pajak Sarang Burung Walet

8. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagai berikut.

- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan kebersihan;
- Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- Pelayanan pasar; dan
- Pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut.

- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut.

- Persetujuan bangunan gedung;
- Penggunaan tenaga asing; dan
- Pengelolaan pertambangan rakyat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 10 Tahun 2022 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Dana Perimbangan

2.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kemudian menurut Fiqih (2019), Dana Perimbangan adalah penerimaan daerah berupa sejumlah uang (kas) yang diperoleh suatu daerah dari Pemerintah Pusat melalui APBN untuk mendanai pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan Daerah tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi fiskal dengan baik.

Berdasarkan dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan Daerah tersebut dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

2.3.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Bagi Hasil bersumber dari sebagai berikut.
 - a. DBH Pajak, yang terdiri dari:
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21; dan
 - Cukai Hasil Tembakau
 - b. DBH Sumber Daya Alam, yang terdiri dari:
 - Kehutanan;
 - Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - Perikanan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Indriani, 2018).

2.4 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang bersifat menambah aset tetap dengan memberikan manfaat lebih dari satu periode dalam rangka pembentukan modal, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan guna mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kualitas aset. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Memiliki masa manfaat yang panjang menjadikan belanja modal memiliki peranan yang penting guna memberikan pelayanan kepada publik. Besaran alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah, berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya (Yanti, 2019). Dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Fisik Lainnya. Berikut masing-masing uraian dari kategori utama dalam Belanja Modal, yaitu sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah, merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, sewa tanah dan balik nama, termasuk pengurangan, pengosongan, pematangan tanah, perataan, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah hingga tanah tersebut dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas inventaris kantor peralatan dan mesin yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan seluruh pengeluaran hingga peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan juga pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan

yang menambah kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan/perawatan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas hingga jalan, irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya, merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan/perawatan fisik aset tetap lainnya yang tidak dapat masuk ke dalam kategori belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Beberapa contoh transaksi keuangan yang termasuk ke dalam kategori belanja modal fisik lainnya yaitu belanja modal buku-buku, jurnal ilmiah, kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, serta hewan ternak dan tanaman.

2.5 Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara, oleh karena itu menurut Halim dalam Indriani (2018), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah lain yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keuangan secara mandiri dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan daerah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah.

2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. *Value for Money*, yaitu penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas:
 - a. Ekonomi, yaitu pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
 - b. Efisiensi, yaitu suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan dana yang ada.
 - c. Efektivitas, yaitu hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mohamad Mahsun dalam Indriani (2018), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan/kegagalan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan. Menurut Syifa (2022), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, dalam Indriani, 2018).

1. Kemampuan struktural organisasinya
Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta

macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah
Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjelaskan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan keuangan daerah
Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.6.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun dalam Martantri (2019) menjelaskan bahwa Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Menurut Ayu dalam Vidia (2022) Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen dalam mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas, sehingga dapat digunakan untuk pengukur tingkat keberhasilan program pemerintah dan perbandingan antara kesesuaian tujuan dan implementasinya. Menurut Wibowo dalam Heryanti, dkk (2019) pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan daerah terdapat perbedaan dari rencana atau hasil kinerja telah sesuai dari yang direncanakan.

Menurut Halim dalam Gradiana (2019) tujuan penilaian kinerja di sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus lebih baik daripada sekarang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.
5. Memotivasi pegawai
Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*.
6. Menciptakan akuntabilitas publik
Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa datang (Indriani, 2018)

2.6.3 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja. Kinerja Anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan Anggaran Kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku manager eksekutif. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah (Indriani, 2018) antara lain:

1. Analisis Surplus/Defisit APBD
Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal dipemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut (PP 58 Tahun 2005) yaitu: surplus/defisit = pendapatan daerah – belanja daerah, sedangkan menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006 yaitu: surplus/defisit = (pendapatan – belanja) + silpa + pencairan dana cadangan.
2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
DDF antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti (i) PAD terhadap total penerimaan daerah, (ii) Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD.

3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
Kemandirian Keuangan Daerah adalah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
4. Upaya Fiskal/Posisi Fiskal
Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar disuatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak.
5. Analisis Efektivitas (CLR)
Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
6. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah
Indek Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak/retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.
7. Rasio Kemandirian Daerah
Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.
8. Kemampuan Pinjaman Daerah (DSCR)
Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik dengan konsekuensi harus mengembalikannya dalam waktu tertentu.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah.

1. Rasio Efektivitas PAD, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi dalam Rigel, 2017).
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Rigel, 2017).
3. Rasio Keserasian, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal (Rigel, 2017).
4. Rasio Pertumbuhan, rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Rigel, 2017).

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Rigel, 2017).

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan rasio pertumbuhan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Karena rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi dalam Kadek dan Putu, 2019).

2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.7.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Indriani Putri Ekasuryana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016.	Independen: -PAD -Dana Perimbangan Dependen -Kinerja Keuangan	Regresi Linier Berganda	- PAD secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor - Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
2	Ayu Fitriah Magfira (2022) Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten	Independen: -Belanja Modal -Dana Perimbangan -PAD Dependen	Regresi Linier Berganda	-Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah -PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

No	Nama Penneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Bantaeng Tahun 2011-2020.	-Kinerja Keuangan		kabupaten Bantaeng tahun 2011-2020.
3	Toto Suwarsa dan Thayeb Ihsa Sawal (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018.	Independen: - PAD - Dana Perimbangan Dependen: -Kinerja Keuangan	Regresi Linier Berganda	-PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan -Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung. -Secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung
4	Ade Pipit Fatmawasti & Oktaviani Cynthya Dewi Pratiwi (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2014-2016.	Independen: - PAD - Dana Perimbangan Dependen: -Kinerja Keuangan	Regresi Linier Berganda	-PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan -Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2014-2016. -Secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Cimahi.
5	Asri Yanti (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada	Independen: -PAD -Dana Perimbangan -Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	-PAD dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan -Dana Perimbangan secara parsial

No	Nama Penneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pemerintah Kabupaten di provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017.	Dependen: -Kinerja Keuangan		berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017. -Secara simultan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
6	Ester Trivona Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2018.	Independen: -Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Belanja Modal Dependen: -Kinerja Keuangan	Regresi Linier Berganda	-PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
7	Alfia Maulina, Mustafa Alkamal dan Nabilla Salsa Fahira (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah	Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Belanja Modal	Analisis Regresi Linier Berganda	-Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. -Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

No	Nama Penneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	-Ukuran Pemerintah Daerah Dependen: -Kinerja Keuangan		keuangan pemerintah daerah. -Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8	Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Independen: -Pendapatan asli daerah -Dana perimbangan -Belanja modal Dependen: -Kinerja keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	-Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Secara simultan, PAD, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

No	Nama Panneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9	Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018.	Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Dana Keistimewaan -Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	-Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Dana keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. -Secara simultan, PAD, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi DIY.
10	Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sendana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Belanja Modal Dependen:	Analisis regresi linier berganda	-Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah -belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap

No	Nama Penneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	-Kinerja Keuangan		kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, dapat dilihat pada penelitian Indriani Putri Ekasuryana (2018) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016” terdapat persamaan dalam variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kinerja keuangan daerah dan persamaan metode analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2011-2016 dengan variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022 dengan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

Pada penelitian Ayu Fitriah Magfira (2022) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2011-2020” terdapat persamaan variabel independen dan dependen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan sama-sama membahas mengenai kinerja keuangan daerah, serta kesamaan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2011-2020 dengan pemilihan perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022 dengan pemilihan perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan.

Penelitian Toto Suwarsa dan Thayeb Ihsa Sawal (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2018) terdapat persamaan dalam variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan daerah dan persamaan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2018 menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022 menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

Penelitian Ade Pipit Fatmawasti dan Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi tahun 2014-2016) terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah untuk diteliti dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Kota Cimahi tahun 2016-2018 menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022 dengan menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

Penelitian Asri Yanti (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017” terdapat persamaan variabel independen dan dependen pada penelitian ini dan persamaan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

Penelitian Ester Trivona Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2018” terdapat persamaan variabel penelitian yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebagai variabel independen, dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan persamaan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan subjek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

Penelitian Alfia Maulina, Mustafa Alkamal dan Nabilla Salsa Fahira (2021) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” terdapat persamaan variabel dependen pada penelitian ini yaitu menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk diteliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022 dengan menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

Penelitian Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat” terdapat persamaan variabel independen dan dependen pada penelitian ini, dan persamaan metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian ini pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Penelitian Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018” terdapat persamaan variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 dengan menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022 dengan menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

Penelitian Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sendana (2018) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015” terdapat persamaan variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio pertumbuhan, dan persamaan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2015 dengan menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah dan belanja modal, sedangkan penelitian sekarang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022 dengan menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

2.7.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, karena semakin tinggi dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat akan semakin kuat, sehingga kinerja keuangan akan menurun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli milik daerah yang digali atas potensi yang dimiliki daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya untuk melaksanakan program-program, serta aktivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan yang diterima oleh daerah dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya. Dana perimbangan yang diterima akan menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Belanja modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat (Ayu, 2022). Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah dan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan. Jika pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertambah banyak, maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah (Astuti dan Mimba, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriani Putri Ekasuryana (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016, hasil dari penelitiannya yaitu Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dan secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor periode 2011-2016.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Yanti (2019) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017, hasil dari penelitiannya yaitu PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.

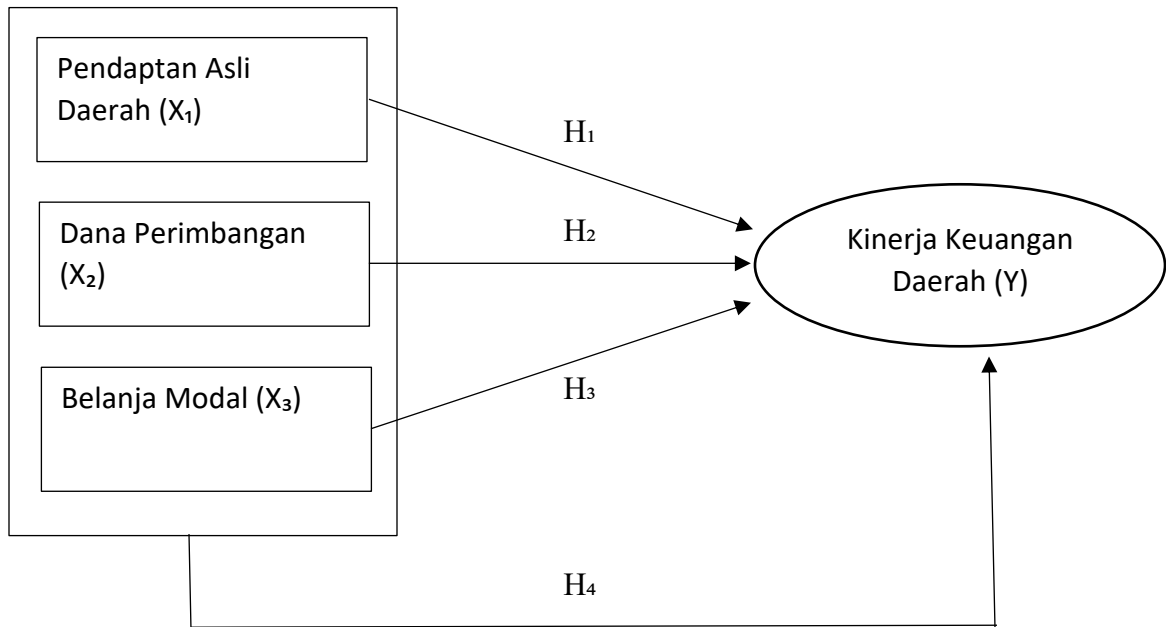
Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disederhanakan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis. Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Hipotesis Penelitian

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
- H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
- H₃ : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
- H₄ : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif *eksploratif*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang di mana data yang di peroleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *geographic region*, maksud dari *geographic region* adalah yang di teliti merupakan wilayah/daerah/negara, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respons) suatu wilayah/daerah/negara tertentu. Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang merupakan data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 2015-2022. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak atau BPS (Sujarweni dalam Indriani, 2018).

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk mempermudah dalam proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Independen/X1)	-Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -Lain-lain PAD yang Sah	$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Perimbangan (Independen/X2)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Modal (Independen/X3)	-Belanja Tanah -Belanja Peralatan dan Mesin -Belanja Gedung dan Bangunan -Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -Belanja Aset Tetap Lainnya	$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja Keuangan (Dependen/Y)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$	Rasio

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah pada tahun ke- n

P_0 = Total Pendapatan Daerah pada tahun sebelum n

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015-2022 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id dengan menggunakan metode *purposive sampling*, berarti penulis menentukan sendiri sampel yang di ambil karena ada pertimbangan tertentu (Sujarweni dalam Indriani, 2018). Kriteria dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.
2. Laporan keuangan delapan tahun terakhir yang memberikan gambaran mengenai perkembangan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.
3. Periode 2015-2022 tersebut lebih relevan dengan keadaan atau situasi sekarang, sehingga hasilnya akan lebih akurat.
4. Kabupaten Bandung telah memasukan data Laporan Realisasi Anggaran di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Republik Indonesia dan situs resmi Pemerintah Daerah tahun 2015-2022.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode pengumpulan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung www.bandungkab.go.id dan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan www.djpk.depkeu.go.id .

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Data yang terkumpul diolah kemudian di analisis. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif berupa pengujian hipotesis menggunakan uji statistik. Metode yang digunakan adalah menganalisa data dengan langkah-langkah yaitu Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Metode ini digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan mengenai besarnya PAD, Dana

Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung periode 2015-2022.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono dalam Indriani, 2018).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memenuhi uji normalitas data pada model regresi linier berganda. Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi linier berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengujian asumsi klasik mempunyai kontak yang menguji dengan regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah dengan perhitungan statistik menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi dari nilai *Kolmogorov-Smirnov* > 5%, data yang digunakan berdistribusi normal (Imam Ghozali dalam Indriani, 2018).

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas dapat dilihat dari:

1. *Nilai Tolerance*
2. *Variance Inflation Factor (VIF)*

Menurut Duwi dalam Indriani (2018) multikolonieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode uji multikolonieritas dengan melihat *tolerance* dan *inflation factor (VIF)* pada model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai VIF >10 atau jika nilai tolerance $< 0,1$ maka ada multikolonieritas dalam model regresi.
2. Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai tolerance $> 0,1$ maka tidak ada multikolonieritas dalam model regresi.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika pengamatan dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghazali, 2011:139).

Untuk mendekati ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode grafik plot. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya kondisi korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Menurut Duwi Priyatno (2012, 172) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Run Test. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Syarat tidak adanya autokorelasi di dalam model regresi linier apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $>0,05$ (random).

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression*), yaitu dengan melihat PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = PAD

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Belanja Modal

e = Error

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Cara pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jika nilai t hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan pengaruh secara parsial antara variabel independen dan dependen.
2. Jika nilai t hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan lainnya lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dan dependen.

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen dengan variabel dependen.

3.7.4.2 Uji Signifikansi Simultan (uji statistik F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian berikut ini:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka berarti bahwa secara simultan variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara simultan variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

R Square (R^2) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan dirubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Duwi dalam Indriani, 2018). Nilai R Square digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R Square mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted R Square* berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R Square* semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut menjelaskan dependen.

BAB IV

Hasil Penelitian & Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data

4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha (Instansi Pemerintah)

Objek pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Soreang. Kabupaten Bandung merupakan induk dari wilayah Bandung Raya yang kemudian dimekarkan menjadi wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada koordinat $107^{\circ}14'$ - $107^{\circ}56'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}49'$ - $7^{\circ}18'$ Lintang Selatan. Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi dengan kemiringan lereng antara 0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung seperti di utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Perahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Di selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Secara administratif Kabupaten Bandung terletak di antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Garut. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,67 Ha, yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”

2. Misi

Misi 1 : Membangkitkan daya saing daerah.

Misi 2 : Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.

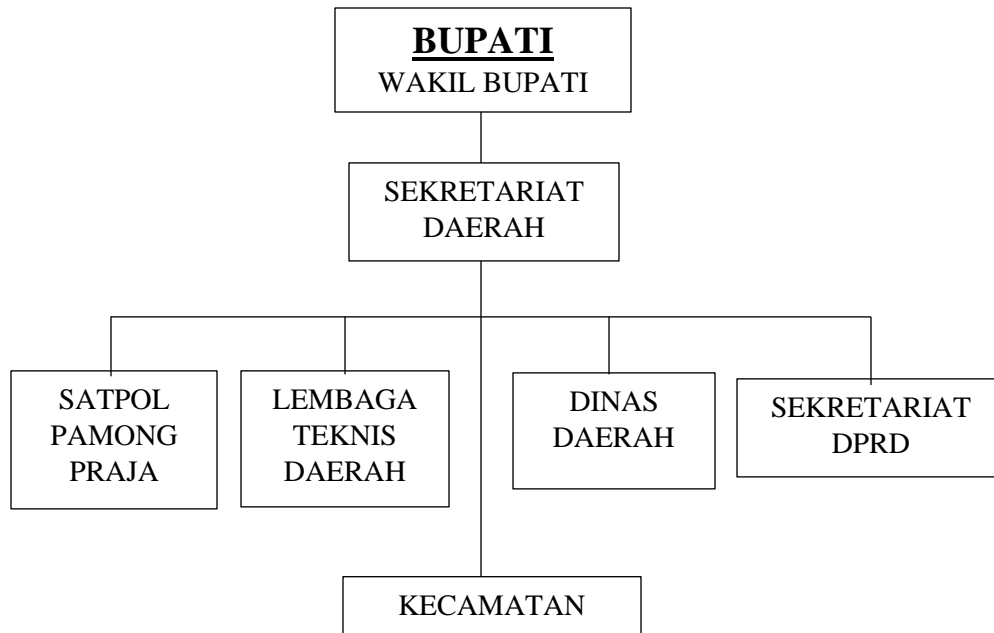
Misi 3 : Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat rendah.

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dibantu oleh sekretariat daerah. Berikut ini adalah struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kabupaten Bandung

Tugas pokok dan wewenang masing-masing perangkat daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Tugas Bupati dan Wakil Bupati

Bupati mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk di bahas dan ditetapkan bersama;

- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Wakil Bupati mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal, menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.

2. Sekretariat Daerah

Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- f. Penyelenggaran tugas Setda;
- g. Pembinaan teknis administratif kepada inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung, Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Penyusunan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidangnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, lembaga teknis daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; serta
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Dinas Daerah

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan layanan umum; dan
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

6. Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

4.2. Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti

Penelitian ini memiliki empat data yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah menggunakan rasio keuangan yaitu rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah menggunakan rumus rasio $(\text{Total Pendapatan Daerah pada tahun ke-}n - \text{Total Pendapatan Daerah pada tahun sebelum } n / \text{Total Pendapatan Daerah pada tahun sebelum } n \times 100\%)$.

Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal di ukur menggunakan rasio. Pendapatan Asli Daerah di hitung dengan ukuran rasio $(\text{Realisasi pendapatan asli daerah} / \text{Total pendapatan daerah} \times 100\%)$, dana perimbangan di hitung dengan ukuran rasio $(\text{Realisasi dana perimbangan} / \text{Total pendapatan daerah} \times 100\%)$, dan belanja modal di hitung dengan ukuran rasio $(\text{Realisasi belanja modal} / \text{Total belanja daerah} \times 100\%)$. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2015-2022.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2015	Rp621.097.012.583,90	Rp3.961.557.568.140,90	15,68
2016	Rp856.514.244.254,37	Rp4.607.669.372.893,37	18,59
2017	Rp936.905.730.680,24	Rp5.081.260.297.655,24	18,44
2018	Rp927.543.321.132,26	Rp5.259.974.811.369,26	17,63
2019	Rp1.025.354.252.357,57	Rp5.730.185.099.102,57	17,89

2020	Rp1.019.355.741.053,99	Rp5.345.992.773.326,99	19,07
2021	Rp1.095.969.843.558,02	Rp5.752.869.024.783,02	19,05
2022	Rp1.248.858.860.203	Rp5.925.628.980.810	21,08

Sumber: www.bandungkab.go.id (Data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat setiap tahunnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar Rp1.248.858.860.203 atau sebesar 21,08%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terendah terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp621.097.012.583,90 atau sebesar 15,68%

Tabel 4.2 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bandung periode 2015-2022.

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2015	Rp2.286.770.311.691,00	Rp3.961.557.568.140,90	57,72
2016	Rp2.992.226.054.296,00	Rp4.607.669.372.893,37	64,94
2017	Rp3.009.662.895.582,00	Rp5.081.260.297.655,24	59,23
2018	Rp3.137.666.226.435,00	Rp5.259.974.811.369,26	59,65
2019	Rp3.374.888.933.422,00	Rp5.730.185.099.102,57	58,90
2020	Rp2.957.339.226.626,00	Rp5.345.992.773.326,99	55,32
2021	Rp3.292.864.308.056,00	Rp5.752.869.024.783,02	57,24
2022	Rp3.923.619.386.568	Rp5.925.628.980.810	66,21

Sumber: www.bandungkab.go.id (Data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi Dana Perimbangan cenderung meningkat kecuali pada tahun 2020 terdapat penurunan sebesar Rp417.549.706.796,00 dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid-19. Realisasi Dana Perimbangan tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar Rp3.923.619.386.568 atau sebesar 66,21%. Sedangkan Dana Perimbangan terendah terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.286.770.311.691,00 atau sebesar 57,72%.

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bandung periode 2015-2022.

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase (%)
2015	Rp531.127.521.281,26	Rp4.402.405.669.627,15	12,06
2016	Rp569.467.789.003,50	Rp4.640.192.716.482,49	12,27
2017	Rp628.497.495.405,49	Rp4.609.698.467.829,26	13,63
2018	Rp713.093.010.271,89	Rp4.560.097.691.605,50	15,64
2019	Rp1.088.249.765.480,00	Rp5.153.022.333.530,96	21,12

2020	Rp733.918.711.581,00	Rp4.830.154.692.840,01	15,19
2021	Rp706.782.037.278,00	Rp4.833.509.366.389,00	14,62
2022	Rp926.206.508.099	Rp6.556.644.921.511	14,13

Sumber: www.bandungkab.go.id (Data diolah, 2023)

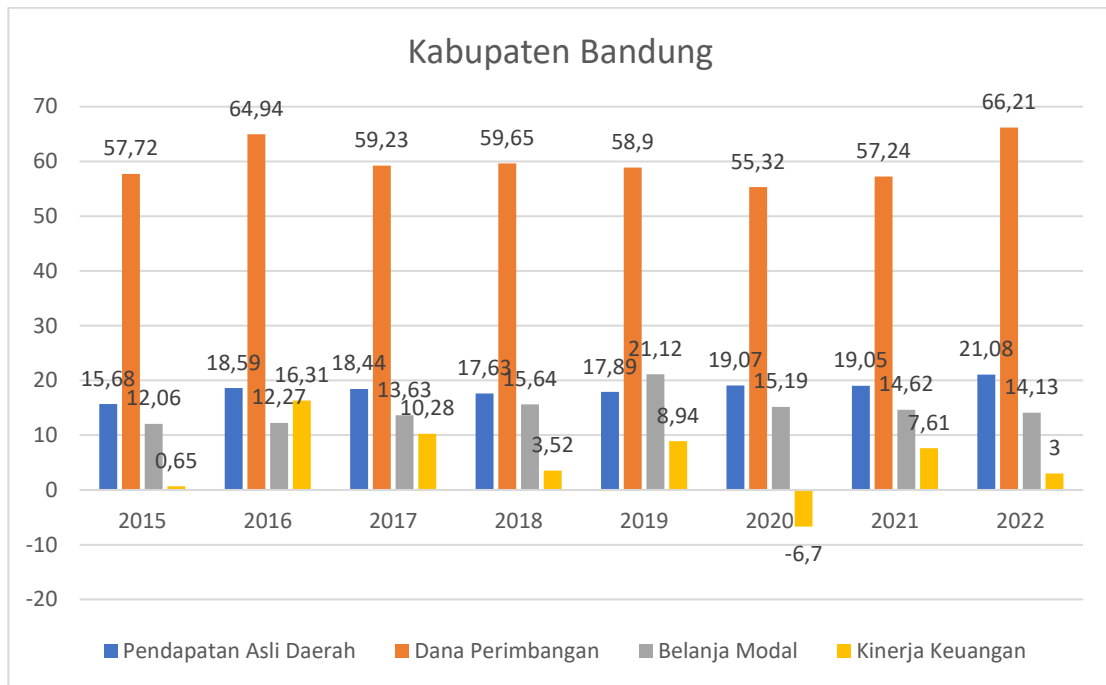
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Modal cenderung mengalami kenaikan. Realisasi Belanja Modal tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.088.249.765.480,00 atau sebesar 21,12%. Sedangkan Belanja Modal terendah terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp531.127.521.281,26 atau sebesar 12,06%.

Tabel 4.4 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung periode 2015-2022.

Tahun	Pendapatan Daerah	Pertumbuhan (%)
2014	Rp3.935.914.885.663,78	-
2015	Rp3.961.557.568.140,90	0,65
2016	Rp4.607.669.372.893,37	16,31
2017	Rp5.081.260.297.655,24	10,28
2018	Rp5.259.974.811.369,26	3,52
2019	Rp5.730.185.099.102,57	8,94
2020	Rp5.345.992.773.326,99	-6,70
2021	Rp5.752.869.024.783,02	7,61
2022	Rp5.925.628.980.810	3,00

Sumber: www.bandungkab.go.id (Data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 pertumbuhan Pendapatan Daerah mengalami penurunan hingga dibawah 0% yaitu sebesar (6,70)%. Hal itu karena adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Perhitungan data yang telah diperoleh tersaji pada grafik berikut.



Gambar 4.2
Rasio Kabupaten Bandung

Gambaran kondisi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan daerah dapat di lihat pada gambar 4.2. Rasio Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 21,08%, dengan rasio dana perimbangan yang tertinggi juga yaitu 66,21%, dan rasio belanja modal dengan nilai 14,13%, menyebabkan nilai kinerja keuangan rendah hingga mencapai 3%. Sedangkan rasio kinerja keuangan terendah terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai di bawah 0% yaitu sebesar (6,70)%, yang disebabkan oleh tingginya dana perimbangan 55,32%, rendahnya rasio pendapatan asli daerah 19,07%, dan rasio belanja modal 15,19%, hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19.

4.3. Analisis Data

Selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS 26.

4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan daerah. Berikut gambaran analisis statistik deskriptif.

Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	8	15,68	21,08	18,4288	1,52766
Dana Perimbangan	8	55,32	66,21	59,9013	3,77082
Belanja Modal	8	12,06	21,12	14,8325	2,84229
Kinerja Keuangan Daerah	8	-6,70	16,31	5,4512	6,95397
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada Pendapatan Asli Daerah, nilai minimum 15,68, nilai maksimum 21,08, nilai rata-rata (*mean*) 18,4288, serta nilai standar deviasi 1,52766.
- b. Pada Dana Perimbangan, nilai minimum 55,32, nilai maksimum 66,21, nilai rata-rata (*mean*) 59,9013, serta nilai standar deviasi 3,77082.
- c. Pada Belanja Modal, nilai minimum 12,06, nilai maksimum 21,12, nilai rata-rata (*mean*) 14,8325, serta nilai standar deviasi 2,84229.
- d. Pada Kinerja Keuangan Daerah, nilai minimum (6,70), nilai maksimum 16,31, nilai rata-rata (*mean*) 5,4512, serta nilai standar deviasi 6,95397.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan adalah uji *One Sample Kolomogrov Smirnov*. Adapun hasil pengolahan uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas *ONE-Sample Kolomogrof-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,60685795
Most Extreme Differences	Absolute	,213
	Positive	,212
	Negative	-,213
Test Statistic		,213
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26

Dari tabel 4.6 yang merupakan *output* dari pengolahan data untuk uji normalitas dengan *One-Sample Kolomogrov Smirnov*, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi (*Asymp.sig 2-tailed*) sebesar 0,200. Dengan hasil signifikansi lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka nilai residual dari uji tersebut adalah normal. dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi, dimana prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak multikolonieritas. Dalam pengujian ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dikatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Berikut hasil dari uji multikolonieritas:

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	,734	1,363
	Dana Perimbangan	,693	1,444
	Belanja Modal	,907	1,103

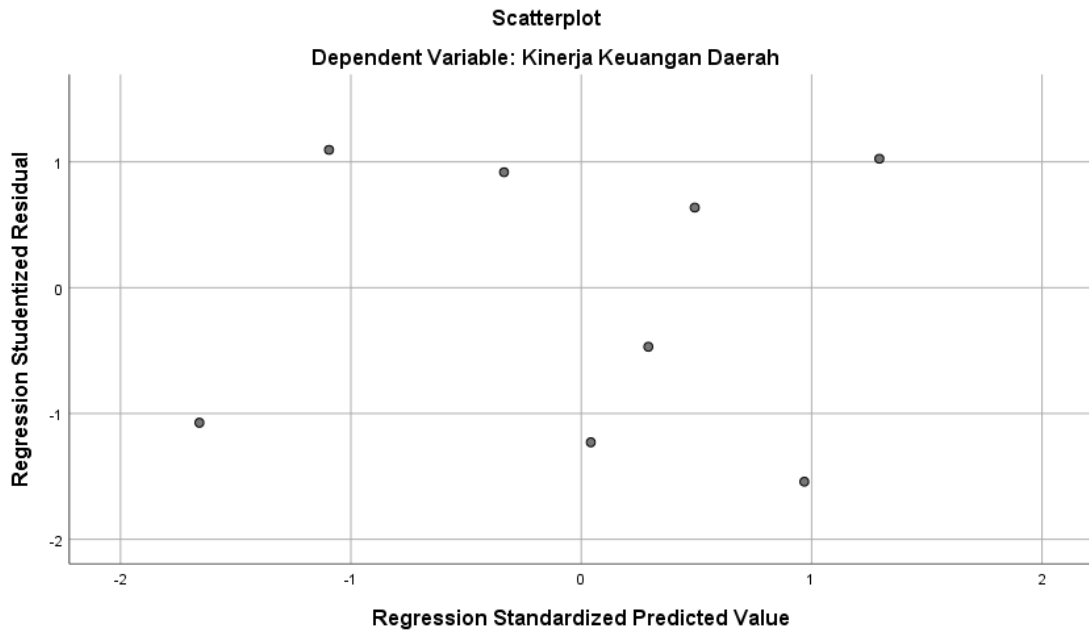
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai VIF Pendapatan Asli Daerah 1,363, nilai VIF Dana Perimbangan 1,444 dan nilai VIF Belanja Modal 1,103 yang artinya masing-masing dari nilai tersebut kurang dari 10, sedangkan nilai *Tolerance* Pendapatan Asli Daerah 0,734, nilai *Tolerance* Dana Perimbangan 0,693 dan nilai *Tolerance* Belanja Modal 0,907 yang artinya masing-masing dari nilai tersebut lebih dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolonieritas di antara variabel bebas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan pola titik/metode grafik plot. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Terjadinya heteroskedastisitas dalam metode grafik plot ditunjukkan dengan adanya pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit). Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas:



Gambar 4.3

Pola titik-titik Scatterplot

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan regresi yang berbasis dari autokorelasi. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian ini menggunakan metode Run Test. Berikut hasil dari uji autokorelasi:

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,83349
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	7
Z	1,146
Asymp. Sig. (2-tailed)	,252

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26

Hasil dari uji autokorelasi dengan metode Run Test adalah sebesar 0,252 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk melakukan analisis regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi seperti pada uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini. Model persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X1 = Pendapatan Asli Daerah
- X2 = Dana Perimbangan
- X3 = Belanja Modal
- e = Error

Hasil dari uji koefisien regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-51,161	6,821		-7,501	,002
	Pendapatan Asli Daerah	-1,506	,279	-,551	-5,406	,006
	Dana Perimbangan	1,309	,116	1,181	11,270	,000
	Belanja Modal	,402	,135	,273	2,983	,041

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26

Dari tabel 4.9 dapat dilihat pada kolom B *Unstandardized Coefficients*.

Persamaan regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut.

$$Y = -51,161 - 1,506 \text{ PAD} + 1,309 \text{ Dana Perimbangan} + 0,402 \text{ Belanja Modal}$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nilai konstanta sebesar -51,161, artinya apabila semua variabel independen yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal adalah konstan, maka kinerja keuangan nilainya adalah -51,161.
2. Koefisien regresi PAD sebesar -1,506, menunjukkan apabila PAD meningkat sebesar satu persen artinya kinerja keuangan pemerintah daerah menurun sebesar -1,506 dengan anggapan bahwa variabel lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar 1,309, menunjukkan apabila Dana Perimbangan meningkat satu persen artinya kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 1,309 dengan anggapan bahwa variabel lainnya bernilai tetap.
4. Koefisien regresi Belanja Modal sebesar 0,402, menunjukkan apabila Belanja Modal meningkat satu persen artinya kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,402 dengan anggapan bahwa variabel lainnya tetap.

4.3.4 Analisis Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis terdiri dari uji

koefisien regresi secara parsial (uji t), koefisien secara simultan (uji F), dan analisis determinasi.

4.3.4.1 Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($n-k-1$) maka dapat disimpulkan pengaruh secara parsial antara variabel independen dan dependen.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($n-k-1$) maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dan dependen.

Nilai t tabel dengan $df = n-k-1 = 8-3-1 = 4$, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 2,132. Selain itu uji t tersebut dapat pula dilihat dari besarnya t signifikansi dibandingkan dengan 0,05 atau taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Berikut hasil dari uji koefisien regresi secara parsial.

Tabel 4.10 Uji Parsial (uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-51,161	6,821		-7,501	,002
	Pendapatan Asli Daerah	-1,506	,279	-,551	-5,406	,006
	Dana Perimbangan	1,309	,116	1,181	11,270	,000
	Belanja Modal	,402	,135	,273	2,983	,041

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung $< t \text{ tabel}$ dimana $-5,406 < 2,132$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung 2015-2022.
2. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai t hitung $> t \text{ tabel}$ dimana $11,270 > 2,132$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung 2015-2022.

3. Variabel Belanja Modal memiliki nilai t hitung $>$ t tabel dimana $2,983 > 2,132$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung 2015-2022.

4.3.4.2 Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat signifikansi atau dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

1. Jika F hitung $>$ F tabel ($n-k$) maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung $<$ F tabel ($n-k$) maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Nilai F tabel dengan $df = n-k = 8-3 = 5$, maka nilai tabel diperoleh sebesar 5,409. Selain itu uji F tersebut dapat pula dilihat dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Berikut hasil dari uji koefisien regresi secara simultan.

Tabel 4.11 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118,446	3	39,482	42,465	,002 ^b
	Residual	3,719	4	,930		
	Total	122,165	7			

a. Dependent Variable: kinerja keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar $42,465 >$ F tabel sebesar 5,409 dengan signifikansi $= 0,002 < 0,05$ yang artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

4.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi adalah pengujian untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variance dari variabel dependennya. Nilai koefisien detreminasi adalah antara nol sampai dengan satu. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi.

Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,985 ^a	,970	,947	,96423

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: kinerja keuangan daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa Adjusted R Square memiliki nilai sebesar 0,947. Berarti nilai tersebut dapat diartikan seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebesar 94,7% sedangkan sisanya sebesar 5,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022, maka dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut.

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji yang telah diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung $-5,406 < t$ tabel $2,132$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022. Koefisien bernilai negatif sebesar $-1,506$ yang berarti bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat satu satuan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar $-1,506$ atau sebesar $-150,6\%$.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum tentu mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat. Hal ini terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang menekankan perolehan PAD dari berbagai sumber yang dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal itu tidak serta merta mempengaruhi meningkatnya kinerja keuangan daerah, karena dana perimbangan di Kabupaten Bandung masih menjadi dana utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Apabila sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diterima semakin tinggi, maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah sehingga tidak meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hasil ini memberikan arti bahwa meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2021) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, disebabkan karena pajak daerah seperti pajak restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD belum mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Langsa itu sendiri. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2016-2021 yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah maka akan mempengaruhi tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji yang telah diperoleh bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $11,270 > t$ tabel $2,132$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Koefisien bernilai positif sebesar $1,309$ yang berarti bahwa apabila variabel dana perimbangan mengalami kenaikan satu satuan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan sebesar $1,309$ atau sebesar $130,9\%$.

Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan

kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan dana perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tentunya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga akan semakin tinggi, sehingga dapat menjalankan program-program yang efektif. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kinerja keuangan karena dengan semakin tingginya dana tentu akan lebih mudah dalam pengelolaan dan pembangunan secara merata. Dengan adanya dana perimbangan diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan pembangunan daerah sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan income yang lebih besar sehingga Pendapatan Asli Daerah akan meningkat dan nantinya daerah tersebut dapat mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri. Maka dari itu, dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi Dana Perimbangan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji yang telah diperoleh bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $2,983 > t$ tabel $2,132$ dengan tingkat signifikansi $0,041 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Koefisien bernilai positif sebesar $0,402$ yang berarti bahwa apabila variabel Belanja Modal mengalami kenaikan satu satuan maka variabel kinerja keuangan daerah juga mengalami kenaikan sebesar $0,402$ atau sebesar $40,2\%$. Hal ini menandakan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pembentukan modal yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Realisasi belanja modal yang dilakukan dapat meningkatkan aktiva tetap pemerintah daerah dan menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan investasi pemerintah daerah. Belanja modal juga bisa dikatakan sebagai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik

dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan (Andirfa dkk, 2016). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya alokasi Belanja Modal maka Kinerja Keuangan Daerah juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andirfa, dkk (2016) yang berjudul Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan membuktikan bahwa dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah.

4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji yang telah diperoleh menggunakan uji simultan (uji f), memperoleh nilai f hitung lebih besar dari pada f tabel yaitu $42,465 > 5,409$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,947 atau 94,7% menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal sebesar 94,7% dan sisanya 5,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di uji dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022.

Secara simultan atau secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Agustina (2018) menjelaskan bahwa variabel atau faktor-faktor harus dijalankan bersama agar menghasilkan perubahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pada uji simultan mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam menyelaraskan pemanfaatan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sehingga secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah secara individual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan dan belanja modal secara individual berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa ada sinergi yang baik, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berhasil dalam menggabungkan faktor-faktor tersebut sehingga memperoleh kinerja keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 yang menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penulis melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2015-2022. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Parsial, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Artinya, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitriah Magfira (2022) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
2. Secara Parsial, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Artinya semakin tinggi Dana Perimbangan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung akan semakin meningkat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Pipit Fatmawasti & Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi (2019), Ayu Fitriah Magfira (2022), Alfia Maulina, Mustafa Alkamal & Nabilla Salsa Fahira (2021) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, artinya setiap kenaikan dana perimbangan akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ester Trivona Nauw & Ikhsan Budi Riharjo (2021) yang menunjukkan bahwa hasil Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga meningkatnya dana perimbangan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Secara Parsial, Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Artinya, meningkatnya belanja modal maka akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfia Maulina, Mustafa Alkamal & Nabilla Salsa Fahira (2021) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya setiap kenaikan belanja modal akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitriah Magfira (2022) yang menunjukkan hasil penelitian belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan daerah, sehingga meningkatnya belanja modal tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Secara Simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung 2015-2022. Artinya faktor-faktor yang dijalankan bersama tidak terdapat masalah dalam menyelaraskan pemanfaatannya sehingga menciptakan kinerja keuangan yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2022. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asri Yanti (2019), Tri Yuni Pratiwi (2018), Ihsan Wahyudin & Hastuti (2020) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya hasil pengujian pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil Penelitian dan kesimpulan telah dijabarkan sebelumnya, maka adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai Akuntansi Sektor Publik, bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2. Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan sampel yang lebih luas seperti pada Provinsi, dengan tujuan untuk mengetahui daerah mana saja yang kinerja keuangan daerahnya sudah meningkat.
- b. Diharapkan dapat menambah atau mengubah variabel independen dan menambah tahun periode untuk mengetahui lebih lanjut pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah.
- c. Diharapkan dapat menggunakan rasio keuangan yang berbeda untuk mengukur kinerja keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas atau rasio efisiensi, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai Pemerintah Daerah untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Ni Putu Gina Sukma & Sedana, Ida Bagus Panji. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol 7 (2). Hal 1080-1110.
- Asri Yanti, Asri. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Astiti, Desak Nyoman Yulia & Mimba, Ni Putu Sri H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 13 (3). Hal. 1924-1950.
- Deswira, A. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Vol. 17, No. 1. Hal. 72-88.
- Ekasuryana, Indriani P. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Fathah, Rigel N. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. [online] vol 8 (1), pp. 2442-4439.
- Fatmawasti, Ade P & Pratiwi, Oktaviani Cynthia D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2014-2016. *Jurnal Akuntansi*. Vol 12 (2).
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A & Kusufi, Muhammad S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Indriani, D dan Sastradipraja, U. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Cirebon Tahun Anggaran 2008-2012. *Portofolio*, 11 (1), hal. 55-76.
- Kamaroellah, R Agus. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Nuansa*. Vol. 14. No. 1.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. [Diakses 13 September]

- Magfira, Ayu F. (2022). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011-2020*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almada.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martantri, Nurlita. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Lverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017*. Thesis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Maulina, A., Alkamal, M., dan Fahira, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. Vol 5 (2), pp. 390-399.
- Muhayanah, Fisa A. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nauw, E. Dan Riharjo, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 10 (6).
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2023). *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung*. <https://bandungkab.go.id/> . [Diakses 13 September 2022].
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 10 Tahun 2022 tentang *Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. No. 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Prasasti, Swastika E. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013*. Skripsi. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Prastiwi, N. dan Aji, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 28 (1), pp 89-105.

- Prayoga, Ricky. (2023). PAD Kabupaten Bandung tahun 2022 naik. *Antaraneews.com*. tersedia di <https://www.antaraneews.com/berita/3557991/pad-kabupaten-bandung-tahun-2022-naik> [Diakses 2 Juni 2023].
- Priyatno, Duwi (2012), *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*, Yogyakarta, Penerbit Andi Publisher.
- Putri, Fiqih E. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Putri, Ni Kadek Novia I & Darmayanti, Ni Putu Ayu. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemrintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, [online] vol. 8 (5), pp, 2834-2861.
- Putri, Vidia U. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2021*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Sholeh, Syifa M. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2016-2020*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Suwarsa, T & Sawal, T Ihsa. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Thauun 2016-2018. *Jurnal Akuntansi*. Vol 12 (2). Hal. 41-52.
- Taek, Gradian M. (2019). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Periode Anggaran 2012-2017*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. [Diakses 13 Januari 2023].
- _____. No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. [Diakses 13 Oktober 2022].
- _____. No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. [Diakses 13 Januari 2023].
- _____. No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. [Diakses 13 Oktober 2022].
- _____. No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Wahyudin, I. Dan Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*. Vol 1 (1), pp. 86-97.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhea Novitasari Bekhci
Alamat : Kp. Gunung Batu II RT 02, RW 10, Desa Sukaharja,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, 16830
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 10 Oktober 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Kertasari 03
• SMP : SMPN 2 Sukamakmur
• SMA : SMAN 1 Sukamakmur
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2023
Peneliti,

(Dhea Novitasari Bekhci)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Uji t

df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$
1	6,314	12,706
2	2,920	4,303
3	2,353	3,182
4	2,132	2,776
5	2,015	2,571
6	1,943	2,447
7	1,895	2,365
8	1,860	2,306
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
11	1,796	2,201
12	1,782	2,179
13	1,771	2,160
14	1,761	2,145
15	1,753	2,131
16	1,746	2,120
17	1,740	2,110
18	1,734	2,101
19	1,729	2,093
20	1,725	2,086
21	1,721	2,080
22	1,717	2,074
23	1,714	2,069
24	1,711	2,064
25	1,708	2,060
26	1,706	2,056
27	1,703	2,052
28	1,701	2,048
29	1,699	2,045
30	1,697	2,042
31	1,696	2,040
32	1,694	2,037
33	1,692	2,035
34	1,691	2,032
35	1,690	2,030

Lampiran 2 Tabel Uji F

$\alpha =$ 0,05	$df_1=(k-1)$							
	$df_2=(n$ $-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7
1	161.448	199,500	215.707	224,583	230,162	233.986	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266